

PEMUDA KATOLIK DAN POLITIK¹

P. Otto Gusti, SVD

1. Pendahuluan:

Para pendiri RI masih berumur relatif muda ketika terlibat dalam politik. Soekarno berumur 14 tahun ketika ia pertama kali terlibat dalam organisasi politik yakni Jong Java. Dalam pertemuan Jong Java di Surabaya ia menyampaikan sebuah pidato yang membuatnya dikenal publik. Ketika mendirikan PNI Soekarno baru berumur 27 tahun. Hatta juga berumur sangat muda yakni 15 tahun ketika pertama kali terjun ke dunia politik. Salah seorang tokoh politik Katolik, Ignasius Kasimo, juga sudah sejak masa muda terlibat dalam dunia politik. Sejak berumur 31 ia sudah menjadi anggota Volksraad dan ikut menandatangani petisi Soetardjo yang menghendaki kemerdekaan Hindia Belanda.

Contoh-contoh ini mengungkapkan secara kasat mata kalau bangsa Indonesia dibangun atas idealisme dan perjuangan kaum muda. Juga perubahan-perubahan penting yang mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia seperti tahun 66 dan 98 diprakarsai oleh kaum muda.

Maka refleksi tentang peran kaum muda Katolik dalam politik bukan suatu tema yang bergerak di ruang kosong, tapi berpijak pada pergulatan sejarah bangsa Indonesia.

2. Patologi Politik

2.1. Politik Tubuh

Saya memulai dengan sebuah model kampanye politik di NTT. Harian Pos Kupang (PK) tanggal 6 Mei 2011 menurunkan sebuah berita menarik berjudul “Lusia Lebu Raya Goyang Lamahora”. Seperti diberitakan PK, istri Gubernur NTT ini sempat menghipnotis warga Lamahora dengan lagu *Terajana* dan *Cicak Rowo* ketika ikut berkampanye untuk salah satu paket dalam Pilkada di Lembata tahun lalu².

Tentu tak ada soal mendasar jika para politisi bernyanyi atau bergoyang dangdut dalam sebuah perayaan ulang tahun, pesta nikah, syukuran permandian anak atau acara-acara privat lainnya. Menjadi soal dan

¹ Dibawakan pada pertemuan OMK sekeuskupan Mumere di Bola pada tanggal 16 Oktober 2012

² Bdk. Harian Pos Kupang, 02-05-2011, hlm. 1

masyarakat patut melihat dengan tatapan kritis ketika goyang dangdut menjadi metode berkampanye dalam pilkada.

Fenomena “goyang Lamahora” dapat ditempatkan dan ditafsir dalam kerangka perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Goyang Lamahora adalah bagian dari politik pencitraan yang menjadi ciri khas demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Politik pencitraan ini dapat disejajarkan dengan fenomena maraknya kandidasi para artis oleh partai-partai politik yang meramaikan bursa calon pemilihan kepala daerah dan juga calon legislatif.

Secara prosedural fenomen ini dapat ditafsir sebagai kemajuan dalam kehidupan berdemokrasi karena menunjukkan luasnya partisipasi demokratis warga negara Indonesia untuk mengambil bagian dalam hidup berpolitik. Namun di sisi lain, secara substansial gejala ini sesungguhnya merupakan gambaran kasat mata patologi hubungan antara perempuan dan politik dalam ranah politik praktis di Indonesia.

Sesungguhnya pencalonan para artis belum menjadi bukti empiris kesadaran gender para elite politik kita. Alasannya, para artis dipilih pada tempat pertama bukan karena kompetensi politis dan integritas moral yang dimilikinya, tapi lantaran kemolekan tubuh dan popularitas pribadi. Partisipasi politik kaum perempuan direduksi menjadi politik tubuh. Dengan bantuan media massa para artis dipakai sebagai iklan untuk mendongkrak citra partai-partai politik dan elite politik yang kian buram dan terpuruk di mata masyarakat³ Dengan fenomena goyang Lamahora serta kandidasi para artis, elite politik sedang mengacaukan politik dengan pasar. Politik sebagai deliberasi rasional di ruang publik berubah wajah menjadi nyanyian dangdut, spanduk, *billboards* di pinggir-pinggir jalan, kemolekan tubuh perempuan dan iklan-iklan di televisi.

Goyang Lamahora adalah bukti kasat mata hegemoni logika pasar atas politik pemilu dan pilkada. Akibatnya, ruang publik politik berubah rupa menjadi pasar yang marak KKN, kebohongan, penipuan serta iklan-iklan politik manipulatif. Dalam kampanye pilkada tak ada lagi dialog atau wacana rasional tentang persoalan substansial hidup masyarakat pemilih seperti misalnya masalah kemiskinan, bahaya korporasi tambang yang akan mengeruk kekayaan alam rakyat atau korupsi yang menyebabkan rakyat kehilangan akses pada pelayanan kebutuhan-kebutuhan dasar.⁴

Akibat dari dominasi pasar atas politik adalah lahirnya individu-individu apatis. Individu yang apatis terhadap politik pada gilirannya menjadi sasaran empuk manipulasi pasar. Tak ada lagi warga kritis yang mengekspresikan kebebasannya di ruang publik. Yang ada adalah massa

³ Bdk. Otto Gusti, *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?*, Maumere: Penerbit Ledalero, 2011, hlm. 33

⁴ Bdk. F. Budi Hardiman, 2010, hlm. 190

konsumen yang telah mengalami depolitisasi. Masyarakat massa tak mampu bersifat kritis dan rentan dimobilisasi demi sebuah politik kekuasaan. Massa adalah lahan subur bertumbuhnya politik uang dan KKN.

2.2. Politik Kartel

Hegemoni modal dalam ranah politik juga terungkap dalam fenomena kartel politik yang marak dalam praktik perpolitikan di tanah air dewasa ini. Kartel adalah term ilmu ekonomi yang berarti „koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan di antara anggota kartel“.⁵

Konsep kartel politik dapat digunakan untuk menjelaskan karakter politik Indonesia, baik dalam sistem kepartaian, tingkah laku elite, maupun koalisi di tingkat parlemen. Dalam sistem kartel politik terbangun sistem monopoli yang berdampak pada minimalisasi persaingan, tindakan menoleransi korupsi dan kolusi serta hancurnya fungsi institusi-institusi demokratis.

Politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar di antara elite politik. Sistem ini diciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Kartel politik berbeda dengan sistem otoritarianisme-birokratik yang memakai sistem „penyingkiran“ (*exclusionary*) elemen-elemen oposisi. Kartel lebih mengutamakan mekanisme „perangkulan“ (*incorporation*) dari elite yang memiliki latar belakang ideologis berbeda.

Dalam sistem pasar, pihak yang paling dirugikan oleh kartel adalah konsumen karena mereka harus membeli barang dengan harga yang sudah diatur oleh para pemain di pasar. Dalam politik, pihak yang paling dirugikan adalah massa-rakyat. Sistem politik dikoordinasikan oleh para elite partai sedemikian rupa dengan meningkatkan saling pengertian di kalangan elite. Kekuasaan menjadi tidak memiliki pertanggungjawaban. Secara prosedural, sistem itu bisa dikatakan demokratis karena pemilu dilakukan secara reguler. Akan tetapi, kompetensi antarpantai akan berubah menjadi kolusi antarelite begitu kotak pemilihan ditutup dan suara dihitung.

Kartel politik membawa beberapa dampak negatif bagi masa depan sistem perpolitikan di Indonesia. *Pertama*, pragmatisme politik. Banyak aktivis radikal yang terpaksa meninggalkan idealismenya ketika memasuki ranah politik praktis karena mereka hanya bisa bekerja jika mentaati logika pragmatis politik praktis. Mereka meninggalkan cita-cita membangun partai dari bawah, mengorganisasi dan meradikalisasi kelas buruh dan petani serta memperjuangkan masyarakat yang lebih setara. Pragmatisme politik

⁵ Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos”, dalam *Prisma. Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*, Vol. 28, Oktober 2009

harus berhadapan dengan logika kartel yang mau merangkul semua dalam saling pengertian dan kerja sama. Dalam konteks ini dapat dipahami mengapa para aktivis korban penculikan misalnya rela menjadi agen dari para penculiknya.

Kedua, batas antara mereka yang memerintah dan oposisi menjadi tidak jelas. Di sini terdapat saling pengertian antara pemerintah dan oposisi. Partai-partai oposisi tidak lagi menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Akibatnya, para elite politik tidak responsif lagi terhadap suara rakyat. Kartel politik adalah lonceng kematian bagi demokrasi karena demokrasi mengandaikan adanya perbedaan jelas antara pemerintah dan partai oposisi yang mengontrol jalannya kekuasaan. Kekhawatiran untuk kalah dalam sebuah pemilihan umum adalah insentif bagi politikus atau partai politik untuk lebih tanggap terhadap rakyat yang memilihnya.

Ketiga, sistem kartel adalah sistem kolusif yang berakibat pada pengebirian kekuatan massa-rakyat. Stabilitas untuk para elite yang disebabkan oleh sistem „perangkulan“ para lawan politik harus dibayar dengan penyingkiran massa-rakyat. Penyingkiran tidak dilakukan dengan represi, namun dengan mematikan sejumlah fungsi dari institusi-institusi, kendati fungsi simboliknya tetap dipelihara. Pengebirian KPK merupakan bagian dari kartel politik yang mentoleransi segala korupsi dan kolusi.

Keempat, politik kartel memberi hasil ironis bagi kekuatan politik masyarakat. Ia menghasilkan massa-rakyat yang relatif jinak yang tidak jauh berbeda dengan massa mengambang di zaman orde baru. Ironinya ialah, apa yang dicapai dengan represi brutal oleh Orde Baru dapat dicapai dengan persuasi dan manipulasi dalam iklim politik kartel.

2.3. Mahalnya Biaya Pilkada

Kartel politik atau dominasi pasar atas politik menyebabkan biaya politik umumnya atau secara khusus biaya pilkada atau pemilihan legislatif di Indonesia menjadi sangat mahal. Menurut hasil penelitian Prof Stein Kristiansen dari Universitas Agder, Norwegia dan UGM, untuk menjadi bupati di Indonesia seseorang tidak segan-segan mengeluarkan biaya sekitar 5 hingga 20 milliard. Sementara itu gaji seorang bupati cuma berkisar dari 6 sampai 7 juta perbulan. Bupati terpilih akan menggunakan pelbagai cara untuk menutup kembali investasi yang dikeluarkan selama proses pilkada. Korupsi menjadi sebuah keniscayaan dalam politik pilkada yang mangandalkan iklan-iklan politik, pencitraan dan politik bagi-bagi uang.

Runtuhnya politik hanya dapat diatasi dengan membangun garis demarkasi yang tegas antara pasar dan ruang publik serta mengembalikan politik ke kodrat awalnya sebagai deliberasi rasional di ruang publik.

3. Gereja dan Politik

Persoalan politik yang dihadapi bangsa Indonesia seperti diuraikan di atas menuntut keterlibatan gereja untuk mengambil bagian dalam memecahkan persoalan tersebut. Gereja adalah bagian dari masyarakat sipil dan memiliki tanggungjawab sosial untuk menata masyarakat yang adil dan bebas.

Gereja adalah persekutuan umat Allah yang tengah berziarah di dunia. Basis iman gerejani adalah hidup dan karya Yesus sendiri seperti dikisahkan dalam kitab suci. Dalam diri Yesus, Tuhan terlibat dalam dunia dan sejarah manusia yang penuh hiruk-pikuk dosa dan kejatuhan. Hal ini membawa beberapa konsekwensi: *Pertama*, keterlibatan Allah dalam diri Yesus menjadi tanda keselamatan dan penyelamatan yang diwujudkan dalam inkarnasi, dan karena itu menjadi tindakan sakramental. *Kedua*, keterlibatan Tuhan itu tidak bersifat netral. Tuhan melakukan *affirmative action* yang nyata, dengan memihak manusia yang lemah dan berdosa, agar mereka diselamatkan melalui penebusan. Pilihan tersebut menyangkut nasib orang banyak yang dibela. Maka, Allah yang kita imani sesungguhnya bersifat politis.⁶ Politik di sini dimengerti dalam arti yang lebih luas dari sekedar politik kekuasaan.

Kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia ini diteruskan oleh gereja. Gereja di sini pertama-tama dipahami sebagai persekutuan umat beriman. Gereja adalah sarana yang menghadirkan Kerajaan Allah ke tengah dunia.⁷ Relasi antara politik dan gereja bersifat ambivalen. Di satu sisi ada pemisahan antara agama dan negara, antara gereja dan birokrat pemerintahan. Di sisi lain agama memiliki tanggung jawab sosial untuk terlibat di tengah dunia serta mengambil sikap dan posisi yang jelas terhadap peristiwa-peristiwa dunia.

Dalam hubungan dengan kekuasaan politik Gereja tidak campur tangan dalam persaingan merebut kekuasaan. Namun gereja harus terlibat dan bertanggung jawab mengawasi jalannya kekuasaan politik, sebab kekuasaan politik selalu menyangkut nasib, kepentingan, keselamatan orang banyak. Karena itu secara etis gereja tidak pernah boleh bersikap netral dalam hubungan politik, tapi selalu mengambil posisi yang jelas yakni keberpihakan kepada yang lemah, miskin, tertindas dan menderita. Dan hal ini sudah ditunjukkan oleh Yesus sendiri semasa hidupnya seperti dikisahkan dalam injil-injil.

⁶ Bdk. Ignas Kleden, Kata Pengantar: Antara Teologi Politik dan Sosiologi Keselamatan, dalam: Eddy Kristianto, *Sakramen Politik*, Yogyakarta: Penerbit Lamalera 2008, hlm. X-XI

⁷ Karl Rahner, *Sendung und Gnade*, Muenchen- Wien- Innsbruck: Tyrolia Verlag, 1959, hlm. 307

Politik Kristiani dapat memberikan sumbangan berarti guna mengatasi patologi politik yang tengah mendera bangsa kita. Etika politik Kristian berpijak pada prinsip-prinsip etika sosial biblis berikut ini:

Pertama, sikap dasar *menghormati kehidupan*. Pada tanggal 25 Maret 1995, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan Surat Ensiklik *Evangelium Vitae* mengenai nilai dan ciri kehidupan yang tak dapat diganggu-gugat. Mengawali Surat Ensiklik itu Paus mengatakan, “Injil kehidupan adalah pusat pesan Yesus. Pesan yang diterima oleh Gereja dengan penuh cinta ini harus diwartakan dengan kesetiaan yang berani sebagai kabar gembira bagi manusia di sepanjang jaman dan setiap budaya Manusia dipanggil untuk menuju kepenuhan hidup yang jauh melampaui hidupnya di dunia ini, karena hidup manusia berarti ambil bagian dalam hidup Allah. Keagungan panggilan adikodrati ini menyatakan kebesaran dan nilai hidup manusia yang tak terkatakan, bahkan pada tahap hidup di dunia ini”. Selanjutnya dalam Surat Ensiklik ini dibicarakan mengenai sikap Gereja terhadap aborsi, euthanasia, hukuman mati yang bisa disebut merupakan wujud-wujud yang disebut budaya kematian. Politik Katolik mesti mempunyai tujuan dasar ini.

Kedua, berkembangnya penghargaan terhadap *martabat manusia*. Penghargaan terhadap martabat manusia merupakan sikap dasar manusia terhadap manusia lain, karena manusia diciptakan menurut citra Allah. Keyakinan seperti itu merupakan syarat mutlak bagi terbangunnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Memang manusia tidak ada yang sama. Tetapi setiap bentuk diskriminasi entah sosial, kultural, religius atau apa pun yang lain, berlawanan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Secara lebih konkret, pelecehan terhadap martabat manusia ini tampak dalam berbagai macam bentuk kekerasan yang akhir-akhir ini merebak di masyarakat kita. Politik Katolik yang menghargai martabat manusia terwujud dalam pengakuan akan prinsip hak-hak asasi manusia serta pengembangan demokrasi sebagai struktur sosial satu-satunya di mana martabat manusia dan hak-hak asasi manusia dapat dilindungi. Maka setiap politisi Katolik dituntut oleh imannya untuk melawan setiap bentuk penistaan terhadap martabat manusia serta ikut berjuang membongkar pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lalu.

Ketiga, berkembangnya *keadilan jender*. Gerakan untuk menegakkan keadilan jender biasanya dikaitkan dengan gerakan feminis. Yang perlu didukung ialah gerakan yang mengandung keyakinan kukuh mengenai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan tidak menolak perbedaan. Setara tidak berarti sama dan berbeda jangan diartikan tidak setara. Untuk itu diperlukan perubahan cara berpikir yang membenarkan tata-sosial yang tidak adil. Gerakan seperti ini menggugat praktek kehidupan, termasuk kehidupan beragama, untuk membangkitkan tata kehidupan baru yang adil dan menghargai keluhuran martabat manusia.

Keempat, berkembangnya *religiositas yang terbuka*. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak terjadi konflik dengan label agama. Kalau dikaji lebih dalam, sebenarnya yang paling dasar bukanlah masalah agama. Konflik agama, seperti halnya konflik antar suku, adalah gejala dari penyakit sosial yang disebut komunalisme. Dalam situasi seperti itu agama dengan mudah diperalat, bahkan tidak mustahil dipakai sebagai legitimasi penggunaan kekerasan. Religiositas yang terbuka mau mengembangkan kehidupan dengan cara *dialogal transformatif* (lawan dari *konseptual konfrontatif*). Buah yang diharapkan ialah penghayatan iman yang *inklusif-toleran, plural-dialogal*. Dengan demikian penghayatan keagamaan yang *eksklusif-sektarian* ditinggalkan. Dalam kehidupan bernegara seorang politisi Katolik tidak pernah menggunakan label-label agamanya untuk kepentingan kekuasaan. Nilai-nilai kekatolikan yang komunal hendaknya diterjemahkan ke dalam term-term rasional sebelum digunakan di ruang publik yang plural agar term-term tersebut dapat juga dimengerti oleh kelompok lain.

Kelima, berkembangnya tanggungjawab untuk memajukan *kepentingan atau kebaikan umum*. Kepentingan atau kesejahteraan bersama adalah kondisi sosial yang memungkinkan setiap pribadi mencapai keutuhan pribadi dan martabatnya sebagai manusia. Kesejahteraan umum ini dapat dimengerti dalam konteks global, nasional maupun lokal. Kesejahteraan seperti ini hanya mungkin terwujud kalau setiap orang menyadari dirinya sebagai bagian dari umat manusia, masyarakat atau komunitas yang lebih kecil. Lawannya ialah *individualisme* yang dapat berkembang liar. Kalau ini dibiarkan, kesejahteraan bersama, keseimbangan, damai dalam dan antar kelompok, wilayah maupun negara akan hancur. Masalah kemiskinan yang belum dapat diatasi di Indonesia, sebagian (besar) disebabkan oleh sangat lemahnya kesadaran tanggungjawab bagi kepentingan atau kebaikan bersama ini. Dalam konteks ini kekatolikan seorang politisi tidak ditunjukkan oleh kedekatannya dengan gereja atau para pastor, tapi sejauh mana ia berjuang memerangi kemiskinan, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yang mendera kehidupan bangsa kita.

Keenam, berkembangnya semangat *kesetiakawanan* dan *kerelaan berbagi*. Setiap orang adalah warga umat manusia yang satu. Sebagai sesama manusia, semua orang wajib saling mencintai dan dipanggil untuk bahu-membahu membangun kehidupan bersama yang semakin sejahtera. Kesetiakawanan adalah salah satu bentuk dari perintah untuk saling mencintai. Erat berhubungan dengan ini adalah prinsip *subsidiaritas* dan *partisipasi*. Dalam kehidupan bersama, tidak boleh ada yang merasa diri terlalu kuat sehingga tidak membutuhkan apa pun dari orang lain. Sebaliknya tidak boleh ada orang yang merasa diri terlalu lemah, sehingga tidak dapat menyumbangkan apa pun untuk kesejahteraan bersama. Sementara itu dalam kehidupan bersama, hal-hal yang dapat diurus sendiri pada lapisan paling bawah, janganlah dicampuri oleh lapisan yang lebih atas. Kalau ini dilanggar, terjadilah penindasan dan kesejahteraan umum berada dalam bahaya. Kecuali itu perhatian khusus mesti diberikan kepada saudara-saudari yang *miskin* dan *lemah*.

Kedelapan, berkembangnya kesadaran akan keharusan *melestarikan alam*. Pengamatan selintas menunjukkan bahwa lingkungan hidup diperlakukan sewenang-wenang. Kalau demikian lingkungan hidup akan hancur. Pada gilirannya kehancuran lingkungan hidup akan menghancurkan kehidupan manusia sendiri karena seluruh alam semesta merupakan kesatuan yang berhubungan satu dengan yang lain. Kesadaran akan keharusan memelihara lingkungan hidup tidak hanya menyangkut kehidupan manusia sekarang, tetapi juga kehidupan generasi mendatang.

4. Kesimpulan: Berguru Pada Ignatius Yoseph Kasimo (1900-1986)

Dalam hubungan antara agama dan negara, salah satu persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah kegagalan para politisinya untuk menerjemahkan solidaritas pra-politis (agama, komunal) ke dalam solidaritas politis atau nasional. Akibatnya, yang merasa kalah dalam politik nasional, kembali mencari perlindungan dan rasa aman dalam solidaritas komunal yang pra-politis dalam kelompok budayanya masing-masing.

Di tengah situasi seperti ini, Ignatius Yoseph Kasimo kiranya menjadi teladan sekaligus sumber inspirasi bagi para politisi Katolik. Nama Kasimo menghilang dari panggung catatan sejarah Indonesia seiring dengan lenyapnya kejujuran sebagai nilai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara.⁸ Akhir-akhir ini nama Kasimo kembali muncul dan dianjurkan sebagai salah seorang kandidat pahlawan nasional. Hak kepahlawanan Kasimo pada tempat pertama bukan karena kekatolikannya, tetapi karena kemampuannya menghadirkan inspirasi kejujuran, keindonesiaan, dan kemanusiaan untuk keutuhan Indonesia.

Kasimo tidak segan-segan menolak jabatan politik yang ditawarkan. Ia menolak duduk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) serta Kabinet Djuanda (1957- 1959). Alasannya, prosedur pembentukan dua kabinet tersebut tidak konstitusional. Memang, bagi Kasimo dan tokoh-tokoh pergerakan nasional pada zamannya, kedudukan bukanlah tujuan utama. Bagi Kasimo politik bukanlah jembatan menuju kekuasaan, tapi pengabdian demi kesejahteraan bersama. Kasimo bukan berpolitik karena panggilan kekuasaan, tapi berdasarkan empati dan panggilan kemanusiaan.

Meskipun dinobatkan sebagai Bapak Politik Umat Katolik Indonesia, Kasimo membawa partainya menjadi nasional, tidak Katolik-sentris (sektarian). Karena karakter Kasimo yang inklusif, meskipun partai gurem, Partai Katolik pada Pemilu 1955 memperoleh enam kursi di parlemen, padahal jumlah umat Katolik hanya 2,5 persen dari penduduk Indonesia.

⁸ Bdk. St. Sularto, "IJ Kasimo: Jawa yang Mengindonesia", dalam *Kompas* 19 Oktober 2010

Bercermin pada perjuangan Kasimo, para politisi Katolik kontemporer dituntut untuk menerjemahkan imannya ke dalam nilai-nilai perjuangan politik kemanusiaan yang toleran, plural, demokratis, menghargai hak-hak asasi manusia serta memperjuangkan keadilan dan solidaritas sosial. Hanya lewat pintu nilai-nilai universal inilah politisi Katolik dapat berkiprah secara efektif dalam ranah politik publik bangsa Indonesia yang plural ini.